



Pemkab Hanya Dapat Rp 368.500 per Hari

Sedangkan PKL Harus Bayar Retribusi hingga Uang Sampah Rp 25 Ribu

SLEMAN - Pedagang kaki lima (PKL) di aspal utara Lapangan Deggung dalam sehari bisa mencapai 60 orang. Namun, pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman hanya Rp 368.500 per harinya.

Jumlah itu dibebankan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sekaligus Lapangan Deggung Sumali. Menurutnya, pembayaran dengan jumlah tersebut dilakukan tiap kurun periode tertentu. "Semisal dua bulan sekali oleh pemegang rekam. Untuk sewa lahan seluas 1.420 meter persegi," jelasnya.

Dia mengaku, pendapatan dari izin pemakaian area aspal utara

Deggung relatif sedikit. Bahkan jumlahnya tidak mencapai Rp 100 juta dalam setahun. Pihaknya sengaja tidak mematok hitungan maksimal untuk besaran retribusi. Alasannya karena pertimbangan kemampuan ekonomi para PKL.

"Dasar penghitungannya masih menggunakan NJOP tahun 2016 sebesar Rp 243.000," katanya.

Diketahui, izin pemakaian area aspal utara tersebut ditujukan kepada Tri Maryadi sebagai pihak kesatu. Masa berlakunya izin terhitung sejak Januari-Desember 2025. Surat yang dikeluarkan pada 24 Desember 2024 tersebut langsung ditandatangani oleh Tina Hastani yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman.

Terpisah, Tri Maryadi yang menjabat sebagai ketua Paguyuban PKL Deggung mengaku, selain



SISI TROTOAR: Aspal utara Lapangan Deggung yang digunakan untuk pedagang berjualan. menyeter uang retribusi kepada uang sampah dari jasa swasta sebesar Rp 250 ribu. Namun, saat pemkab, dia juga harus membayar

sepi seperti ini dia meminta keringanan jadi Rp 200 ribu tiap harinya.

"Kalau kurang nanti saya tombok pakai uang pribadi," katanya kemarin (10/3).

Dia menyebut, setiap pedagang dimintai uang sebesar Rp 25 ribu setiap hari. Termasuk untuk uang kebersihan.

"Kalau musim panas bisa 60 orang. Kalau sering hujan begini paling 10 sampai 20 orang," kata laki-laki yang juga sebagai pemegang izin pemakaian area aspal utara Taman Deggung ini.

Soal bisa mendapatkan perizinan, Tri menyebut memang membutuhkan proses yang lama. Meski demikian, dia menilai pemberian izin ini justru membuat pedagang lebih tertata dan tertib soal pembuangan sampah.

"Kami dari bawah proses izinnya dan tidak mudah. Dibenturkan

dengan disperindag dan Satpol PP juga," tuturnya.

Disinggung soal pedagang di aspal yang dulunya sudah ditertibkan di Foodcourt Deggung, Tri menyebut itu adalah kewenangan Pemkab Sleman. Di sisi lain, dia tidak masalah apabila pada akhirnya nanti akan ikut ditata.

"Tapi kalau ditertibkan jangan ada satu dua yang boleh jualan di aspal. Harus semua," katanya.

Dia juga menilai, para pedagang ini tidak mengganggu para pejalan kaki. Hal ini lantaran mereka berdagang di jalan aspal dan bukan di trotoar. Umumnya para konsumen juga membawa makanannya ke area Lapangan Deggung.

"Kalau soal sepi *foodcourt*, saya rasa tidak berpengaruh karena menunya beda. Kalau *rame ya rame* semua, kalau sepi ya sama saja," tegasnya. (del/eno/rg)